

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
PRABUMULIH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

Riki Martino Sulistio

NIM. 07011281621079

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA
PRABUMULIH**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**RIKI MARTINO SULISTIO
07011281621079**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Agustus 2020

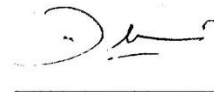
Pembimbing I

**Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001**



Pembimbing II

**Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “: Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 25 November 2020.

Indralaya, 25 November 2020

Ketua

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

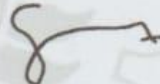


Anggota

2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002



3. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002



4. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002



Mengetahui,
Dean FISIP

Prof. Dr. Agus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu.” (Norman Vincent Peale)

Dengan rahmat Allah Swt, maka skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku tersayang yang telah mendidik, atas cinta kasih yang tulus, serta atas ridho dan do'a yang telah diberikan.
2. Saudara-saudariku yang selalu memberikan dukungan moril.
3. Yth. Ibu Ermanovida. S.Sos. M.Si selaku pembimbing 1 Skripsi.
4. Yth Ibu Dwi Mirani. S.IP. M.Si selaku pembimbing 2 Skripsi.
5. Teman-teman mahasiswa seperjuanganku Administrasi Publik Angkatan 2016 dan sahabat-sahabatku yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku tercinta yang akan selalu kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dengan lancar, tanpa suatu kendala apapun. Penulisan skripsi ini merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi penulis dan semoga akan mendatangkan kebermaknaan yang melimpah bagi penulis, pembaca, dan dunia akademik. Karya berupa skripsi ini terwujud berkat motivasi, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasinya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya
3. Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc selaku dekan Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik universitas sriwijaya
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku ketua jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
5. Ibu Ermanovida. S.Sos. M.Si dan Ibu Dwi Mirani. S.IP. M.Si Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi, terimakasih atas waktu, kesabaran, dukungan, dan inspirasi kepada penulis.
6. Bapak/Ibu dosen Administrasi Publik yang telah membimbing dan mendidik kami.
7. Seluruh jajaran Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan yang telah membantu dan melayani urusan administrasi.
8. Seluruh staf dan pegawai Laboratorium dan Perpustakaan FISIP, UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih yang telah memberikan data dan informasi
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada para pembaca yang berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun.

Penulis

Riki Martino Sulistio

NIM. 07011281621079

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III yang memiliki empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sudah menjalankan pelayanan sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan baik, meskipun masih didapati beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya bentuk komunikasi kepada para pelaku usaha mengenai sistem *Online Single Submission* (OSS) dan fasilitas jaringan internet yang masih cukup lemah sehingga perlu untuk ditingkatkan. Adapun dampak dari implementasi kebijakan sistem *Online Single Submission* (OSS) yaitu, memudahkan para pelaku usaha dalam mengajukan perizinan berusaha, baik dari segi efisiensi waktu, maupun kecepatan proses pembuatan perizinan.

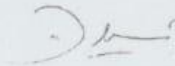
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih, Sistem *Online Single Submission* (OSS).

Pembimbing I



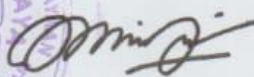
Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001

Pembimbing II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Desember 2020
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the implementation of Online Single Submission (OSS) system in Department of Investment and Integrated Services One Door Prabumulih City. This research uses descriptive-qualitative method. The Data collection technique used in this study were observation, interview and documentation. This study uses implementation theory according to George C. Edward III which has four factors namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of this study indicate that the Prabumulih City Investment Service and Integrated One Stop Service has implemented the Online Single Submission (OSS) system properly, although there are still some obstacles that occur in the implementation, such as lack of communication to the entrepreneur about the online single submission (OSS) system and internet network facilities are still weak enough that it needs to be improved. The impact of the implementation of the Online Single Submission (OSS) system policy is to make it easier for entrepreneur to apply for business licenses, both in terms of time efficiency and the speed of the licensing process.

Keywords: Policy Implementation, Department of Investment and Integrated Services One Door Prabumulih City, System Online Single Submission (OSS)

Advisor I



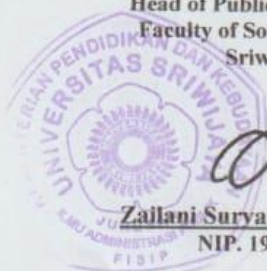
Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP.196911191998032001

Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Desember 2020
Head of Public Administration program
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	12
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	20
1.4.1 Manfaat Teoritis	20
1.4.2 Manfaat Praktis	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	21
2.2 Kebijakan Publik	21
2.3 Implementasi Kebijakan	22
2.4 Model Implementasi Kebijakan	23
2.4.1 Teori Donald van Metter & Carl van Horn	23
2.4.2 Teori George C.Edward III	26
2.4.3 Teori Merilee S. Grindle	32
2.4.4 Teori Mazmanian dan Sabatier	33
2.5 Online Single Submission (OSS)	34
2.6 Teori Implementasi yang Digunakan Dalam Penelitian	35
2.7 Alasan Memilih Teori Implementasi George C.Edwards III	35
2.8 Penelitian Terdahulu	36
2.9 Kerangka Berpikir	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Definisi Konsep	41
3.3 Fokus Penelitian	42
3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.5 Informan penelitian	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.7 Teknik Analisis Data	47
3.8 Jadwal penelitian	48
3.9 Sistematika Penelitian	48

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

4.1 Kota Prabumulih	51
4.1.1 Gambaran Umum Kota Prabumulih	51
4.1.2 Visi Misi Kota Prabumulih	53
4.1.3 Kondisi Geografis Kota Prabumulih	53
4.1.4 Kondisi Demografis Kota Prabumulih	57
4.2 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Prabumulih.....	59
4.2.1 Sejarah DPMPTSP Kota Prabumulih	59
4.2.2 Susunan Organisasi	60
4.2.3 Kewenangan	63
4.2.4 Peran DPMPTSP Kota Prabumulihdalam Pengimplementasian OSS	64
4.2.5 Visi dan Misi	64
4.2.6 Motto DPMPSTP Kota Prabumulih	65
4.2.7 Janji Layanan	65
4.2.8 Maklumat Pelayanan Publik	65
4.2.9 Kepegawaian	66
4.2.10 Perizinan	67
4.3 Implementasi Kebijakan Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih	72
4.3.1 Komunikasi	72
4.3.2 Sumber daya	79
4.3.3 Disposisi	92
4.3.4 Struktur Birokrasi	97
4.4 Matriks Hasil Penelitian	103

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	111

DAFTAR PUSTAKA	112
----------------------	-----

LAMPIRAN	114
----------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penerbitan Izin Perdagangan Usaha Kota Prabumulih Tahun 2014-2017.....	14
Tabel 1.2 Data Penerbitan Perizinan Melalui OSS di Kota Prabumulih Tahun 2019.....	17
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.1 Fokus Penelitian Berdasarkan Ukuran Keberhasilan dan Indikator.....	42
Tabel 4.1 Jumlah penduduk dari Setiap Kelurahan dan Desa Tahun 2018.....	58
Tabel 4.2 Kepegawaian DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2020.....	66
Tabel 4.3 Jumlah dan Jenis Perizinan yang Dikelola DPMPTSP Kota Prabumulih.....	67
Tabel 4.4 Pegawai Staff Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2020.....	81
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih.....	88
Tabel 4.6 Matriks Hasil Penelitian.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Gambaran Umum Pelayanan Perizinan Menggunakan Sistem OSS	16
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1 Peta Kota Prabumulih	55
Gambar 4.2 Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih	59
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Prabumulih	62
Gambar 4.4 Mekanisme Pelayanan Perizinan	74
Gambar 4.5 Prosedur Menggunakan OSS	74
Gambar 4.6 Ruang OSS lounge	77
Gambar 4.7 Berita Mengenai OSS	78
Gambar 4.8 Predikat Kepatuhan Tinggi 2019	84
Gambar 4.9 Cheklist Persyaratan Pemenuhan Komitmen Sektor Perdagangan.....	86
Gambar 4.10 Front Office Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Prabumulih	88
Gambar 4.11 Ruang OSS lounge	89
Gambar 4.12 Fasilitas Kesehatan	89
Gambar 4.13 Banner OSS	90
Gambar 4.14 Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2019.....	94
Gambar 4.15 Gambaran Umum Pelayanan Perizinan Menggunakan Sistem OSS	99
Gambar 4.16 Pedoman Tupoksi Bagian Perizinan dan Non Perizinan	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Surat Tugas	115
Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian	116
Lampiran 3 Izin Penelitian	117
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi	118
Lampiran 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	121
Lampiran 6 Pedoman Wawancara	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Publik (*Public service*) merupakan bagian penting dalam sistem birokrasi di suatu negara. Menurut Sinambela dkk (2010:5) Pelayanan Publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik penting karena senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat luas dan merupakan ujung tombak dalam sistem berbirokrasi. Maka dari itu, pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pelayanan publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan *public service* di Indonesia belum maksimal. Pelayanan yang masih berbasis manual, rendahnya kinerja pegawai, aturan yang berbelit merupakan beberapa contoh faktor yang menyebabkan pelayanan publik di Indonesia belum maksimal. Maka dari itu, dibutuhkan inovasi dan terobosan nyata oleh pemerintah, agar permasalahan tersebut dapat diatasi.

Perizinan merupakan salah satu jenis pelayanan publik dalam bidang administratif. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Terdapat banyak jenis perizinan di Indonesia, sesuai dengan beragamnya usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah perizinan berusaha. Untuk membuat perizinan berusaha maka pemilik usaha harus menjalani proses birokrasi yang panjang dan berbelit dikarenakan pelayanan yang masih berbasis manual serta banyaknya berkas yang harus disiapkan dan persyaratan yang harus dipenuhi, pelaku usaha juga harus mengeluarkan biaya selama

proses pengajuan perizinan untuk menyiapkan berkas dan juga ongkos transportasi. Pelayanan yang masih berbasis manual juga rentan akan tindak pungutan liar diluar prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dinilai tidak efektif dan efisien. Maka dari itu pemerintah merancang dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem ini dibuat karena banyaknya keluhan pelaku usaha mengenai panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilalui untuk membuat perizinan berusaha, sehingga menghambat pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu sistem ini dibuat dalam upaya untuk menyederhanakan perizinan dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah dan modern. Sektor-sektor perizinan yang terintegrasi melalui sistem OSS berdasarkan PP No.24 Tahun 2018, Pasal 85 yaitu, sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sektor kelautan dan perikanan, sektor kesehatan, sektor obat dan makanan, sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor perhubungan, sektor komunikasi dan informatika, sektor keuangan, sektor pariwisata, sektor pendidikan dan kebudayaan, sektor pendidikan tinggi, sektor agama dan keagamaan, sektor ketenagakerjaan, sektor kepolisian, sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah dan sektor ketenaganukliran

Sektor-sektor perizinan berusaha yang terintegrasi melalui sistem *Online Single Submission* tentunya merupakan sektor-sektor penting dan strategis bagi pelaku usaha. Setiap sektor merupakan prioritas percepatan perizinan oleh pemerintah sehingga

diharapkan investasi dan penanaman modal dapat dimaksimalkan. Sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah merupakan salah satu fokus pemerintah dalam percepatan perizinan untuk meningkatkan nilai investasi dan penanaman modal. Seperti contohnya di Kota Prabumulih, yang banyak masyarakatnya berprofesi sebagai pengusaha baik mikro, kecil maupun menengah, tentunya akan sangat terbantu dengan kebijakan ini. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dulunya memakan waktu yang lama, sekarang dapat diterbitkan dalam waktu yang singkat. Adapun jumlah penerbitan perizinan SIUP dari tahun 2014 – 2017 di Kota Prabumulih sebelum diberlakukannya sistem OSS sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah penerbitan izin perdagangan usaha Kota Prabumulih tahun 2014-2017

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2014	330
2	2015	417
3	2016	337
4	2017	201

Sumber : *Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prabumulih*

Dari tabel diatas, dapat dilihat banyaknya jumlah surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang diterbitkan setiap tahunnya oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Prabumulih . Sebanyak 330 surat izin usaha diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan PTSP Kota Prabumulih pada tahun 2014 dan mengalami peningkatn pada tahun berikutnya yaitu sebanyak 417 surat izin usaha perdagangan pada tahun 2015. Namun selepas itu penerbitan SIUP mengalami penurunan yaitu menjadi 337 penerbitan pada tahun 2016 dan 201 penerbitan pada tahun 2017.

Implementasi kebijakan *Online Single Submission* (OSS) di Kota Prabumulih, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih. DPMPTSP Kota Prabumulih memiliki peran yang sangat penting dalam hal memberikan ataupun tidak memberikan legalitas kepada usaha yang

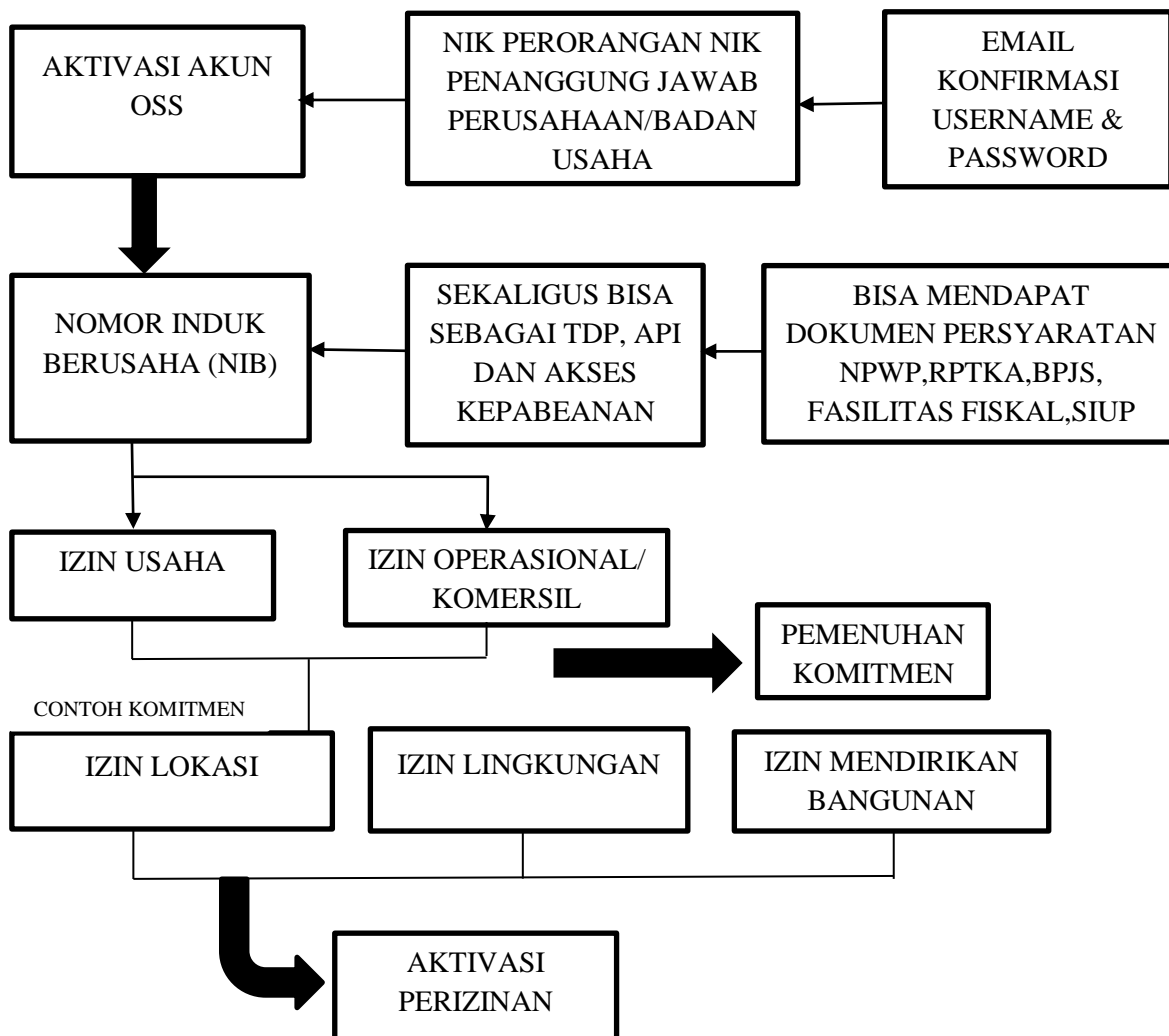
akan dijalankan oleh pelaku usaha. Sebagai kota yang memiliki lokasi strategis, yakni berada di tengah-tengah Provinsi Sumatra Selatan dan dilalui oleh jalur utama lintas Sumatera, Kota Prabumulih merupakan salah satu tujuan utama investor di provinsi Sumatera Selatan. Bahkan seperti yang diberitakan oleh situs warta digital (Dendi Romi “Ini Jumlah Investasi Kota Prabumulih Tahun 2019” Sumeks.com. 3 Februari 2020 <https://sumeks.co/ini-jumlah-investasi-di-kota-prabumulih-2019/?page28332434234=215>) jumlah investasi yang masuk ke Kota Prabumulih pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 89,924 miliar jauh melampaui target awal yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp. 28 miliar. Pada tahun 2019 Kota Prabumulih juga menerima penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2019 dari Frontier Consulting Group sebagai kota kecil terbaik sektor investasi. Dari beberapa hal diatas tentunya fungsi dan peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih sebagai implementor dari kebijakan sistem *Online Single Submission* (OSS) menjadi sangatlah penting.

Adapun peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dalam implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah:

1. DPMPTSP memberikan pendampingan kepada pemohon yang ingin mendaftar melalui OSS, sampai mendapat NIB
2. DPMPTSP melakukan monitoring pengawasan dan pengendalian terhadap komitmen pemohon dalam proses izin komersial/operasional
3. DPMPTSP melakukan koordinasi dengan OPD terkait komitmen pemohon melalui OSS, apabila sudah terdaftar, DPMPTSP dapat melanjutkan proses perizinan
4. Apabila koordinasi dengan OPD belum online, maka dapat dilakukan secara manual

5. Izin yang tidak tertuang dalam peraturan pemerintah 24 tahun 2018, DPMPTSP melakukan perizinan tidak melalui sistem OSS.

Gambaran umum pelayanan perizinan menggunakan sistem OSS di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1 Gambaran Umum Pelayanan Perizinan Menggunakan Sistem OSS

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prabumulih

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa fase pertama dalam proses pembuatan izin berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih melalui sistem OSS adalah dengan aktivasi akun. Caranya yaitu dengan memasukan email, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan beberapa persyaratan lainnya.

Setelah melakukan aktivasi, langkah selanjutnya yaitu pelaku usaha melakukan login ke sistem OSS melalui *Username* dan *Password* yang sudah diberikan sebelumnya melalui email. Setelah itu, pelaku usaha memasukan beberapa keterangan mengenai detail usaha yang akan dijalankan, sampai akhirnya mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). Setelah Mendapat NIB pelaku usaha dapat mengurus izin usaha dan komersial atau operasional berdasarkan komitmen sebagaimana diatur dalam PP No 24 Tahun 2018. Setelah semuanya telah dilakukan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih akan melakukan aktivasi perizinan dari pelaku usaha.

Berikut adalah tabel jumlah penerbitan perizinan melalui situs OSS pada tahun 2019 di Kota Prabumulih.

Tabel 1.2 Data Penerbitan Perizinan Melalui OSS di Kota Prabumulih Tahun 2019

NO	JENIS PERSEROAN	KOMITMEN PENERBITAN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL	KOMITMEN PENERBITAN IZIN USAHA	PENERBITAN NIB DAN IZIN DASAR	JUMLAH
1	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	40	32	10	82
2	Perseroan Terbatas (PT)	45	10	9	64
JUMLAH					146

Sumber : *Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prabumulih*

Dari tabel diatas, dapat dilihat banyaknya jumlah izin berusaha yang diterbitkan OSS pada tahun 2019 di Kota Prabumulih. Terdapat sebanyak 82 penerbitan perizinan untuk persekutuan komanditer (CV/Comamanditaire Vennootschap) dengan rincian 40 penerbitan izin komersil/operasional berdasarkan komitmen, 32 penerbitan izin usaha berdasarkan komitmen dan 10 penerbitan NIB dan izin dasar. Kemudian untuk perizinan terhadap Perseroan Terbatas (PT) terdapat sebanyak 64 penerbitan dengan rincian, 45 penerbitan izin komersil/operasional berdasarkan komitmen, 10 penerbitan izin usaha

berdasarkan komitmen dan 9 penerbitan NIB dan izin dasar. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan izin untuk persekutuan komanditer (CV/Comamanditaire Vennootschap) realtif lebih banyak daripada penerbitan perizinan untuk Perseroan Terbatas (PT).

Dalam proses Implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih ditemui beberapa kendala dan permasalahan, seperti belum adanya Rencana Detail Tata Ruang atau yang disingkat RDTR. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. RDTR sendiri diatur dalam Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. RDTR merupakan bagian penting dalam sistem OSS karena dapat dijadikan rujukan dalam penentuan lokasi berusaha, sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan izin lokasi. Ketiadaan RDTR tentunya berdampak pada terbatasnya informasi yang didapat oleh pelaku usaha mengenai pemetaan lokasi usaha yang akan dijalkannya.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) erat hubungannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena memang kedua kebijakan ini saling berhubungan. RDTR merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten ke dalam rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa RDTR kota mempunyai fungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang di atasnya, dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif. Jika suatu kota sudah memiliki perda mengenai RDTR, maka percepatan pengurusan izin lokasi dapat terlealisasi. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah percaya sudah adanya pengaturan yang detail

mengenai tata ruang, sehingga izin lokasi yang diajukan bisa langsung terbit tanpa perlu pertimbangan teknis (pertek).

Kemudian permasalahan lain yang mengiringi pengimplementasian sistem *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih adalah keterbatasannya perangkat sistem OSS. Perangkat sistem OSS berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, Pasal 92 Ayat 1 terdiri dari, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan perangkat pendukung. Di DPMPTSP Kota Prabumulih sendiri, masih memiliki keterbatasan pada perangkat keras dan perangkat pendukung. Hanya terdapat 2 unit komputer yang disediakan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih untuk melayani masyarakat yang ingin mengajukan perizinan melalui sistem OSS. jumlah tersebut tentunya belum optimal, mengingat banyaknya jumlah pengajuan perizinan berusaha pada tahun 2019 silam. Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih juga belum melengkapi beberapa perangkat pendukung OSS, seperti banner mekanisme pengurusan OSS, ataupun persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan dan dipenuhi. Itulah beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dalam implementasi kebijakan *Online Single Submission* (OSS) yang menjadi masalah dalam penelitian ini

Dari berbagai keberhasilan pemerintahan Kota Prabumulih dalam bidang investasi dan penanaman modal, ternyata masih ditemukan kendala dan permasalahan yang mengiringinya. Kebijakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dirancang oleh pemerintah dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih. Masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan dilengkapi, sehingga tentunya dibutuhkan upaya-upaya nyata oleh DPMPTSP Kota Prabumulih untuk mewujudkannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan sistem *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem *Online Single Submission* Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan data dalam perkembangan ilmu administrasi publik terutama bidang kebijakan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa masukan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dalam menghadapi berbagai faktor penghambat saat mengimplementasikan kebijakan sistem *Online Single Submission*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2019. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, cv
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun 2019
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group
- Herdiansyah, Haris.2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Koentjoro. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA, cv
- Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA, cv
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA, cv
- Syafri, Wirman. 2014. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Mandala Manurung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik Dan Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Indonesia

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jurnal Dan Skripsi:

Anggraini, Novida. 2018. Implementasi Perizinan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Secara Elektronik Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kebayoran Baru Jakarta Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2 No.2

Sumarjono. dkk. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Kudus. *Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus*

Anugrah, Nurhamim. 2018. Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kota Palembang. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya*

Internet:

<https://www.inews.id/finance/makro/sistem-oss-masih-banyak-kendala-terutama-sinkronisasi-daerah-dan-pusat> (Diakses pada 1 Desember 2019)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Prabumulih (Dikutip pada 20 November 2019)